

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI
PEMANFAAT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)**

(Studi Kasus Program PEMP Kabupaten Pangkep)



AHMAD DAHLAN
(PO201204004)

PPW – MANAJEMEN KELAUTAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI
PEMANFAAT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)
(*Studi Kasus Program PEMP Kabupaten Pangkep*)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Konsentrasi Manajemen Kelautan

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD DAHLAN

Nomor Pokok P 0201204004

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

TESIS

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI
PEMANFAAT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)
(*Studi Kasus Program PEMP Kabupaten Pangkep*)**

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD DAHLAN
Nomor Pokok P 0201204004

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 24 Desember 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat

Ketua

Sekretaris

Prof.Dr.I Made Benyamin M.Ec

Prof.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa, M.Sc

Ketua Program Studi
Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dr.Ir.Roland A.Barkey

Prof.Dr.dr.Abd.Razak Thaha, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AHMAD DAHLAN

Nomor Mahasiswa : P 02012004004

**Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Konsentrasi Manajemen Kelautan**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Desember 2008

Yang menyatakan,

AHMAD DAHLAN

PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga tesis yang berjudul “**Analisis Persepsi Masyarakat Pesisir sebagai Pemanfaat Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus Program PEMP Kabupaten Pangkep**” dapat diselesaikan sebagai upaya memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Magister (S2) di Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini cukup banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, terutama kepada Bapak Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec sebagai ketua komisi penasehat dan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai anggota komisi penasehat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, serta kepada Prof. Dr. Ir. M. Natsir Nessa, M.S, Prof. Dr.Ir. Ambo Tuwo, DEA dan Prof. Dr.Ir. Yusran Nur Indar, M.Phill sebagai tim penguji yang telah memberikan saran perbaikan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Ketua Konsentrasi Manajemen Kelautan. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada bapak Ir.H.Iskandar selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan, bapak Ir. M. Natsir Sulaiman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) II serta rekan-rekan dari Dinas dan mahasiswa Program Pascasarjana.

Khusus kepada ibu bapakku Hj. Dahlia dan H. Mansyur Lande, istri tercinta Hj. Muridah dan anak-anakku tersayang Adi Wali Ahmad, Luqman Wali Ahmad dan Fachriwahidin Wali Ahmad, terima kasih atas kesabaran, ketabahan dan dorongan moril yang diberikan selama ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran, saran, ide dan kritikan, saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita semua, amin.

Makassar, 24 Desember 2008

Penulis

ABSTRAK

AHMAD DAHLAN. *Analisis Persepsi Masyarakat Pesisir sebagai Pemanfaat terhadap Peningkatan Pendapatan dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus Program PEMP Kabupaten Pangkep* (dibimbing oleh **I Made Benyamin** dan **Jamaluddin Jompa**).

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui efektivitas program PEMP dalam meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) di Kabupaten Pangkep, dan (2) mengevaluasi peran unsur-unsur/komponen yang terlibat pada program PEMP dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai denda Desember 2008 di Kabupaten Pangkep. Metode pendekatan yang digunakan adalah *deskriptif-kualitatif*, dengan teknik analisis data *skala likert*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, dana ekonomi produktif Program PEMP di Kabupaten Pangkep sudah efektif dalam membantu pengembangan usaha dan peningkatan omzet penjualan KMP, dan dianggap dapat lebih efektif apabila dilakukan diversifikasi usaha KMP. Akan tetapi dana ekonomi produktif (DEP) program PEMP belum efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran masyarakat, serta belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Pangkep secara umum. *Kedua*, unsur-unsur kelembagaan yang terlibat dalam program PEMP belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya konsultan manajemen, tenaga pendamping desa, dan Koperasi lembaga ekonomi pesisir – mikro mitra mina (LEPP-M3). *Ketiga*, pengembangan dan penguatan LEPP-M3 dicirikan dengan terbukanya jejaring usaha, kemampuan untuk melakukan promosi hasil usaha yang dikembangkan KMP, dan berlangsungnya mekanisme perguliran dana secara merata dan berkesinambungan.

.

.

ABSTRACT

AHMAD DAHLAN. *An Analysis on Coastal Community Perception as the users on the Increase of Income and Effectiveness of the Implementation of Coastal Community Economy Empowerment program : A case study of Coastal Community Economy Empowerment program of Pangkep Regency (supervised by I Made Benyamin and Jamaluddin Jompa).*

The research aims to (1) find out the effectiveness of Coastal Community Economy Empowerment program in increasing the income of User Community Group in Pangkep regency, and (2) evaluate the role of elements/components involved in Coastal Community Economy Empowerment Program in implementing their duty and function.

This research was carried out from October to December 2008 in Pangkep regency. The method used was descriptive- qualitative and the data were analyzed using Likert scale.

The results show that (1) Productive Economic Fund of Coastal Community Economy Empowerment program has already been effective in assisting business development and increasing selling turnover of User Community Group, and it is considered to be more effective if verification of User Community Group business is done. However, Productive Economic Fund of Coastal Community Economy Empowerment program has not been effective in decreasing unemployment rate, and it has not been able to increase the prosperity of coastal community in Pangkep Regency in general; (2) Institute elements involved in this Program have not been able to increase the elements involved in this program have not been optimum in carrying out their duty and function, especially Management Consultant, village facilitators, and cooperation of LEPP-M3 (Economic Institute of Coastal Development-Micro, Partner, Interest); (3) The development and strengthening of LEPP-M3 is characterized by chain effort, capacity to promote the products development by user Community Group, and the persistence of mechanism of revolving fund evenly and continuously.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemberdayaan Masyarakat.....	8
B. Kondisi Masyarakat Pesisir	18
C. Kelembagaan Masyarakat Pesisir	22
D. Perekonomian Masyarakat Pesisir	23
E. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).....	25
F. Efektivitas.....	40
G. Kerangka Pikir.....	42
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	44
B. Metode Penelitian	44
C. Metode Pengumpulan Data	45
D. Populasi dan Sampel	45
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46

G. Defenisi Operasional	49
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Kondisi Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir dan Laut.....	52
C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	55
D. Efektivitas Pelaksanaan Program PEMP	57
1. Efektivitas Program PEMP dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat.....	59
2. Peranan unsur-unsur yang terlibat pada Pelaksanaan Program PEMP dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya	77
3. Efektivitas Kelembagaan Koperasi LEPP-M3	84
E. . Strategi Pengembangan Program dan Penguatan Koperasi LEPP-M3 Program PEMP	94
BAB V. PENUTUP	
V.1. Kesimpulan.....	98
V.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
Lampiran 1. Foto	102
Lampiran 2. Kuesiner Penelitian.....	103
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan wawancara.....	106
Lampiran 4. Prosentase umur dan,status,Perkawinan responden.....	108
Prosentase Tingkat Pendidikan terakhir dan pekerjaan Utama Responden.....	109

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
1. Tabel IV.1.	Jumlah Tenaga Kerja, Produksi, dan Nilai Perikanan Tangkap di Kab. Pangkep Tahun 2003-2007.....	56
2. Tabel IV.2.	Tanggapan Anggota KMP Terhadap Bantuan Pinjaman Program PEMP dalam Pengembangan Usaha.....	59
3. Tabel IV.3.	Tanggapan Anggota KMP Terhadap Pengaruh Bantuan/Pinjaman Modal Terhadap Peningkatan Omzet Penjualan/Usaha	61
4. Tabel IV.4.	Tanggapan Anggota KMP Terhadap Penambahan/Perluasan dan/atau Pergantian Asset Produksi (Diversifikasi Usaha).....	70
5. Tabel IV.5.	Tanggapan Anggota KMP Terhadap Peningkatan Tenaga Kerja.....	72
6. Tabel IV.6.	Tanggapan Anggota KMP Terhadap Penambahan Ekonomi Keluarga	74
7. Tabel IV.7.	Tanggapan Anggota KMP Terhadap Pengembangan Matapencarian Alternatif.....	76
8. Tabel IV.8.	Susunan Pengurus Koperasi LEPP-M3 Bahari Lestari Kabupaten Pangkep.....	84
9. Tabel IV.9.	Tanggapan Anggota KMP Terhadap Keterwakilan Kelompok Masyarakat dalam Koperasi LEPP-M3.....	86
10. Tabel IV.10.	Tanggapan Anggota KMP Terhadap Kemudahan Prosedur/Tata Cara Memperoleh Pinjaman/Kredit dari Koperasi LEPP-M3.....	88
11. Tabel IV.11.	Tanggapan Anggota KMP Menyangkut Suku Bunga Pinjaman/Kredit dari Koperasi LEPP-M3.....	90

DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Halaman
1.	Gambar II.1. Prosedur Penyaluran, Pembayaran, dan Bantuan Kegiatan PEMP Periode 2001 – 2003	27
2.	Gambar II.2. Mekanisme Penyaluran Dana Ekonomi Produktif (DEP)	34
3.	Gambar II.3. Kerangka Pikir Penelitian	43
4.	Gambar IV.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pangkep.....	51
5.	Gambar IV.2. Efektivitas Bantuan Dana bergulir dalam Pengembangan Usaha.....	60
6.	Gambar IV.3. Efektivitas Perkembangan Omzet Usaha dari Pengelolaan Dana Bantuan Program PEMP.....	63
7.	Gambar IV.4. Efektivitas Penambahan, Perluasan dan/atau Pergantian Jenis Usaha (Diversifikasi).....	71
8.	Gambar IV.5. Efektivitas Penambahan Peluang Kerja Terhadap Usaha yang Dikelola/Dikembangkan oleh KMP Program PEMP.....	73
9.	Gambar IV.6. Efektivitas Program PEMP terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga	75
10.	Gambar IV.7. Efektivitas Program PEMP dalam Memicu Pengembangan Matapencarian Alternatif Masyarakat	77
11.	Gambar IV.8. Efektivitas Keterwakilan Kelompok Masyarakat dalam Koperasi LEPP-M3 Program PEMP.....	87
12.	Gambar IV.9. Efektivitas Tata Cara/Prosedur Memperoleh Pinjaman di Koperasi LEPP-M3 Program PEMP.....	89
13.	Gambar IV.10. Efektivitas Suku Bunga Pinjaman di Koperasi LEPP-M3 Program PEMP.....	91
14.	Gambar IV.11. Tahapan Perkembangan dan Penguatan Koperasi LEPP-M3 Program PEMP.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai 81.000 km. Wilayah lautannya terdiri dari 5,8 juta km² atau 70 persen dari luas total teritorial Indonesia. Melihat fakta obyektif seperti ini maka konsekuensinya adalah adanya penduduk yang berdiam di wilayah pesisir.

Selama kurang lebih 32 tahun kekuasaan Orde Baru, masyarakat di wilayah pesisir hampir sama sekali tidak mendapatkan sentuhan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi. Persoalannya adalah pengambil kebijakan di negeri ini belum memahami secara komprehensif apa sebenarnya akar permasalahan kemiskinan masyarakat pesisir (Karim.M, 2003)

Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya secara langsung maupun tidak langsung tergantung pada hasil laut. Mereka umumnya berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial-ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan.

Kemiskinan seolah-olah telah melekat akrab dalam kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, tingkat pendapatannya hanya

sekitar Rp 300.000/bulan/kepala keluarga (Kusumastanto, T,2003). Citra kemiskinan nelayan sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Kemiskinan masyarakat pesisir berakar pada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif. Keterbatasan itu ditandai dengan realisasi modal melalui investasi pemerintah dan swasta selama periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) yang hanya 0,02 % dari keseluruhan modal pembangunan.

Konsekuensinya, terutama nelayan, kebutuhan permodalan dipenuhi oleh para tengkulak, atau ponggawa, yang kenyataannya tidak banyak menolong untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, malah cenderung menjeratnya dalam lilitan utang yang tak pernah bisa dilunasi. Demikian pula kultur kewirausahaan mereka masih bersifat manajemen keluarga dengan orientasi sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) diinisiasi untuk memecahkan persoalan tersebut. Cikal bakal program PEMP berawal ketika Dr.Rokhmin Dahuri (Dosen Institut Pertanian Bogor) yang juga berasal dari keluarga nelayan dan menjadi menteri Kelautan dan Perikanan menyadari bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan

nelayan diperlukan program terobosan yang dapat meningkatkan akses para nelayan terhadap modal, manajemen, dan teknologi di satu sisi dan sisi lain dapat mentransformasi struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan.

Program PEMP bertujuan : (1) memfasilitasi proses transformasi kultur kewirausahaan masyarakat pesisir, dari manajemen keluarga berorientasi *subsistence* ke manajemen modern berorientasi bisnis; (2) memberikan kesempatan pembelajaran kepada masyarakat pesisir untuk mengakses lembaga keuangan dengan memfasilitasi pembentukan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina (LEEP-M3).

Tujuan tersebut diupayakan dalam semangat desentralisasi sehingga pelaksanaan program PEMP dilakukan dengan metode *block grant* langsung ke kabupaten/kota. Khusus bagi nelayan, program PEMP juga memfasilitasi pembangunan sarana distribusi solar berupa *Solar Packed Dealer Nelayan* (SPDN) atau Kios Solar Nelayan, yang dilaksanakan atas kerjasama dengan Pertamina dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Bantuan yang diberikan dalam program berupa modal bergulir (*revolving fund*) sehingga mereka dapat memperoleh modal, peningkatan keterampilan pengolahan hasil, peningkatan keterampilan dalam budidaya yang diinginkan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan pasar, pembentukan dan pembinaan kelompok usaha bersama sebagai embrio pembentukan koperasi masyarakat pesisir.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dititik beratkan pada kemandirian lokal dengan merubah strategi pembangunan yang bersifat sentralistik ke desentralistik, maka diharapkan pemberdayaan masyarakat pesisir dikaji lebih mendalam melalui penelitian dengan unsur pengembangan kelembagaan, peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga keterpaduan seperti itulah pemberdayaan masyarakat pesisir dapat meningkat.

Program PEMP yang dimulai sejak tahun 2001 secara terus menerus mengalami berbagai penyempurnaan seiring dengan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, baik masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun instansi-instansi terkait lainnya. Sampai tahun 2004 program ini telah menjangkau ke 246 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia dan telah terbentuk 323 LEPP M3, 9.964 Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) serta menyentuh sekitar 94.184 KK masyarakat pesisir.

Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan program PEMP mulai pada tahun 2001 yang dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten/kota, tahun 2002 dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten/kota, tahun 2003 dilaksanakan di 9 kabupaten/kota, dan pada tahun 2004 dilaksanakan di 14 (Empat belas) kabupaten/kota, serta tahun 2005 dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten/kota, jadi seluruh kab/kota yang berjumlah 23 kab/kota daerah

pesisir Sulawesi Selatan telah dilaksanakan program PEMP (termasuk Propinsi Sulawesi Barat).

Sejak tahun 2001 sampai tahun 2006 jumlah dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan program PEMP sebanyak Rp 39.304.992.000 (Tiga puluh Sembilan Milyar Tiga ratus Empat Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Dua ribu rupiah). Pada tahun 2004 program PEMP memasuki tahap Institusional, dimana dana DEP dijamin pada Bank Pelaksana (BUKOPIN) dan pihak bank melakukan pembinaan terhadap LEPP-M3 dengan pola Swamitra. Adanya program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karenanya pelaksanaan program tersebut harus sepenuhnya dievaluasi sebagai salah satu upaya untuk perbaikan dan pengembangan dalam pengelolaannya, sehingga tujuan dari program tersebut dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat pesisir.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir yaitu melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Didalam program ini masyarakat terlibat pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, program ini memberikan bantuan penguatan modal berupa pinjaman (tanpa agunan) dalam mengelola

usaha bagi masyarakat pesisir melalui kelompok usaha yang diberi nama Dana Ekonomi produktif (DEP). Kelompok yang menerima DEP dinamakan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). Dasar pembentukan kelompok didasarkan pada kesamaan jenis usaha dan kesamaan lokasi.

Untuk itu diharapkan dengan adanya bantuan dana melalui DEP, maka KMP diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya yang dikembangkan melalui program PEMP. Kabupaten Pangkep merupakan salah satu daerah pelaksana program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan memperoleh Anggaran pada tahun 2001,2004 ,(APBN-P) 2005 dan 2006. Untuk menilai persepsi masyarakat sebagai pemanfaat terhadap peningkatan pendapatan dan efektivitas keberhasilan program PEMP di Kabupaten Pangkep, maka dilakukan penelitian ini dan sekaligus hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu acuan informasi berisi tingkat efektivitas program PEMP sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi bagi pihak pengelola program PEMP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah :

- 1) Seberapa efektifkah pelaksanaan program PEMP, dilihat dari tujuan program dalam peningkatan pendapatan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) di Kabupaten Pangkep ?

- 2) Sejauh mana peran unsur-unsur yang terlibat dalam program ini menjalankan tugas pokok dan fungsinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui efektivitas program PEMP dalam peningkatan pendapatan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) di Kabupaten Pangkep.
- 2) Untuk mengevaluasi peran unsur-unsur / komponen yang terlibat pada program PEMP dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- 1) Agar terjadi peningkatan efektivitas pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Pangkep .
- 2) Agar pihak yang terlibat dalam komponen program PEMP dapat lebih meningkatkan peran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 3) Sebagai bahan pembelajaran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam rangka rencana tindak lanjut peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

Kata “pemberdayaan” terlihat muncul lebih kepada sasaran politis, sedangkan “peningkatan kemampuan” muncul lebih bersifat netral (*non politis*), sehingga lebih diterima bagi ahli teknis yang tidak ingin terpengaruh dengan semua yang mungkin dapat memunculkan kecacatan ideology atau politik. Kata “perkuatan” dapat diletakkan diantara keduanya (Yasri, 2004).

Lebih lanjut dikatakan bahwa mungkin kita dapat menganalisa konsep dari “kekuatan, kekuasaan atau kemampuan” yang ada pada masyarakat dilihat dari beberapa komponennya, mengidentifikasi suatu kumpulan pengamatan yang akan menunjukkan pada kita bahwa telah terjadi beberapa pemberdayaan atau peningkatan kemampuan.

Merujuk dari asumsi dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab, maka diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendayagunakan secara efektif kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat (Kusumastanto, 2003).

Pengembangan masyarakat merupakan bagian integral dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut bagi kemakmuran masyarakatnya, oleh karena itu penyelesaiannya perlu dilakukan

melalui strategi yang komprehensif dengan menempatkan sistem sosial-ekonomi dan nilai budaya yang sudah melekat didalam masyarakat sebagai faktor pendorong perubahan. Perkembangan ini pada muaranya akan meningkatkan harkat sumberdaya manusia, kualitas dan sistem atau pranata sosial masyarakat (Hidayat dan Surochiem, 2004)

Strategi pengembangan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir dan laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal.

Dilain pihak pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif (Hidayat dan Surochiem, 2004)

Pengalaman menunjukkan bahwa kesuksesan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat tidak lebih 30 %. Kalau ada yang berhasil dan berkelanjutan, ini dikarenakan program yang diimplementasikan tidak terpaku pada program yang dibuat oleh pemerintah pusat tetapi melalui proses inovasi dan diversifikasi program yang disesuaikan dengan kondisi sosiol-kultural-politik serta sistem nilai yang dianut masyarakat sasaran (Kusumastanto, 2003)

Menurut Kusnadi dalam Solihin (2005), bahwa bentuk kegagalan dalam suatu program pemberdayaan dapat berupa besarnya nilai kemacetan dana bergulir yang akan dikembangkan, penyelewengan penggunaan dana untuk kepentingan di luar program, bubarnya institusi-institusi sosial ekonomi yang dibangun setelah pelaksanaan program berakhir, dan kondisi sosial ekonomi atau kesejahteraan masyarakat nelayan tidak meningkat, akhirnya kegiatan berhenti ditengah jalan.

Upaya pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat beserta keluarganya baik dengan meningkatkan usaha yang ada maupun dengan meningkatkan kesempatan kerja baru. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa pakar yang mengartikan bahwa pemberdayaan berasal dari kata “memberi daya atau memberi energi”, dari sini dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan upaya memberi daya kepada mereka yang lemah atau tidak berdaya agar bisa

mendayagunakan dirinya. Pemberdayaan pada hakekatnya adalah penggalian potensi yang ada dalam diri seseorang, kelompok atau komunitas.

Proses pemberdayaan (empowerment), pada intinya, ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui daya dari lingkungannya.

Kartasmita,G (1996) keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Getting to know the local community

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (*lokal*) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat satu dengan yang lainnya. Mengetahui,

artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dan masyarakat.

b. Gathering knowledge about the local community

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual, adat istiadat, dan jenis pengelompokan serta faktor kepemimpinan baik formal maupun non-formal.

c. Identifying the local leaders

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk *factor the local leaders* harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat.

d. Stimulating the community to realize that it has problems

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu masyarakat perlu pendekatan *persuasive* agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

e. Helping people to discuss their problems

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

f. Helping people to identify their most pressing problems

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

g. Fostering self-confidence

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri ini merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

h. Deciding on a program action

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggi yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

i. Recognition of strengths and resources

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

j. Helping people to continue to work on solving their problems

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

k. Increasing people ability for self-help

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Pemberdayaan masyarakat menekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu system yang mengorganisasi diri mereka sendiri. Dengan pendekatan seperti itu diharapkan masyarakat atau individu yang menjadi kelompok target tidak menjadi obyek melainkan sebagai subyek yang menentukan hidup mereka sendiri. Sehingga diharapkan kegagalan dalam melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat kelompok target tidak terulang sebagaimana yang sering terjadi pada pendekatan pembangunan masyarakat lokal.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat dapat dipahami tidak saja penguatan individu anggota masyarakat semata, tetapi juga sistem nilai dan pranata-pranatanya. Pemberdayaan adalah juga upaya untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Untuk itu menurut Isbandi (2003) bahwa Intervensi sosial yang dikembangkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu intervensi di level mikro (individu, keluarga, dan kelompok) dan intervensi di level makro (komunitas dan organisasi). Intervensi ditingkat makro dilakukan guna melakukan perubahan dan pemberdayaan pada tingkat komunitas dan organisasi.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat perlu penanganan secara terencana dan bersifat integratif, mengingat permasalahan yang ada di dalamnya merupakan sesuatu yang kompleks sehingga diperlukan peranan tidak saja dari dalam masyarakat itu sendiri akan tetapi perlu adanya peran intervensi baik makro maupun mikro dari luar.

Menurut Soesilowati (1971), bahwa untuk memberdayakan masyarakat pesisir maka ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan, yaitu :

- (1) Strategi fasilitasi, diharapkan kelompok yang menjadi sasaran program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen perubah bersama-sama kliennya (masyarakat) mencari penyelesaian.
- (2) Strategi edukatif, strategi ini sesuai dengan masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian akan segmen yang akan diberdayakan.
- (3) Strategi persuasif, strategi ini berusaha membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila target tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan.
- (4) Strategi kekuasaan, strategi kekuasaan yang efektif membutuhkan agen perubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai kemampuan untuk monopoli akses.

Untuk itu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan RI melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir. Program PEMP bukan bersifat *charity* (cuma-cuma) tapi *empowerment* sehingga dapat terus berkembang dan menyentuh sebagian besar masyarakat pesisir.

Penyaluran dana PEMP dengan sistim *block grant* disampaikan langsung kepada masyarakat sebagai stakeholder utama dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan berusaha berbasis pada sumber daya lokal, berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan, serta bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan lokal yang bersifat partisipatif.

PEMP menjadi program unggulan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian dalam jangka panjang program PEMP akan mengarah pada :

- 1). Mengembangkan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang dibangunnya.
- 2). Meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
- 3). Mendorong masyarakat pesisir untuk mengembangkan kemitraan dengan lembaga swasta dengan pemerintah.

B. Kondisi masyarakat pesisir

Semakin panjang pantai, semakin banyak penduduk miskin Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir dan pantai Indonesia merupakan tempat atau kantung-kantung kemiskinan masyarakat nelayan. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan bukanlah suatu yang *independent*, melainkan akibat kebijakan masa lalu yang terlalu terkonsentrasi pada pembangunan wilayah darat *continental orientation* dan melupakan pembangunan wilayah laut *maritime orientation* sehingga menjadikan kelautan dan perikanan sebagai sektor pinggiran (*peripheral*). (Solihin, 2005).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan bisa bermakna *subyektif*, tetapi sekaligus juga bermakna *obyektif*. Secara obyektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin, karena pendapatannya sudah berada di atas garis kemiskinan, yang oleh sementara ahli diukur menurut standar kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan beras dan gizi (Imran. M, 2003).

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah ada keterkaitan erat antara kemiskinan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Tekanan terhadap sumberdaya alam sering diperberat oleh tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Kemiskinan sering pula menjadi lingkaran (*vicious circle*) dimana penduduk yang miskin sering menjadi sebab rusaknya lingkungan pesisir, namun penduduk miskin pula yang akan menanggung dampak dari kerusakan lingkungan. Oleh karenanya, salah satu aspek dalam pengelolaan wilayah pesisir yang baik adalah bagaimana mencari alternative pendapatan sehingga mengurangi tekanan penduduk terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dari sebagian penduduk miskin di Indonesia, sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah pesisir, data hasil-hasil penelitian yang ada sebagai contoh hasil study COREMAP tahun 1997/1998 bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan berkisar antara Rp 82.500 – 225.000 per bulan. Angka tersebut masih dibawah upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah pada tahun yang sama sebesar Rp 95.000 perbulan (Anonim, 2001)

kemiskinan biasa digolongkan dalam dua macam, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang perseorangan atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh Kebutuhan Dasar Minimum (KDM).

Dalam tingkat pendapatan minimum akan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau disebut sebagai Garis Kemiskinan. Perkiraan Garis Kemiskinan dengan menggunakan konsep KDM ini merupakan suatu yang statis sifatnya. Perkembangan Garis Kemiskinan biasanya disesuaikan menurut indeks kemiskinan, di mana tingkat kehidupan penduduk miskin sama sekali tidak mengalami perubahan, sementara itu golongan penduduk yang lain tingkat kehidupannya telah meningkat. Kesulitan utama dalam konsep Kemiskinan *Absolut* adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja melainkan juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor lainnya.

Konsep kemiskinan relatif didasari kenyataan bahwa orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “ tidak miskin “. Sekalipun pendapatan telah mencapai tingkat kebutuhan minimum, namun apabila pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah daripada masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih dalam keadaan miskin.

Sementara itu menurut Azhari (1992: 32), menggolongkan kemiskinan kedalam tiga macam kemiskinan yaitu :

1. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena perkembangan tingkat teknologi yang sangat rendah. Termasuk didalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumber daya alam yang tetap.

2. Kemiskinan struktural

Kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan perkataan lain kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam.

3. Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi / adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta pesta adat lainnya. termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi kemasa depan.

C. Kelembagaan Masyarakat Pesisir

Kelembagaan (institusi) adalah sistem organisasi dari hubungan sosial yang terwujud dari beberapa nilai umum dan mempertemukan beberapa kebutuhan dasar masyarakat. Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang mempunyai arti pola aktivitas yang sudah tersusun baik yang biasanya diikuti adanya asosiasi yang merupakan kelompok-kelompok untuk melaksanakan pola aktivitas tersebut (Widayati,2003)

Pada kelembagaan tradisional masyarakat pesisir, dinamika manusia dan sumberdaya tidak dapat dihindari. Dinamika itu sendiri berarti terjadi pergeseran kepentingan, jumlah pengguna, dan daya resistensi kelembagaan terhadap sistem sosial, politik, ekonomi, termasuk kebijakan pembangunan sektor perikanan dan lautan. Dinamika kelembagaan tradisional berfokus pengelolaan sumberdaya berkisar pada perdebatan pentingnya tujuan sosial dan tujuan ekonomi, asupan teknologi, daya adaptasinya terhadap kebijakan pemerintah atau faktor eksternal lainnya, dan besaran kepatuhan, loyalitas yang masih dimiliki oleh masyarakat pesisir dalam menjalankan tatanan kelembagaan mereka. Sedangkan dinamika kelembagaan tradisional bertumpuh pada orientasi ekonomi berhadapan dengan asupan teknologi, institusi ekonomi mikro, misalnya koperasi dan lembaga perbankan lainnya (Yusran, M. 2005)

Menurut Sallatang (2000), kelembagaan masyarakat terdiri atas kelembagaan masyarakat desa yang dapat diartikan sebagai norma lama

atau aturan-aturan sosial yang merupakan bagian dari lembaga sosial yang saling berintraksi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mempertakankan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, kehidupan manusia yang satu berintegrasi secara melembaga dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya lembaga masyarakat sebagai pranata sosial amat penting karena di dalamnya terdapat sekumpulan peraturan / norma, adat istiadat yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sendiri.

D. Perekonomian Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial-ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan (Anonymous, 2003).

Kelompok masyarakat pesisir memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya seperti usaha perikanan tangkap dan petani ikan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar. Pengembangan lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat perlu dimotivasi untuk berkiprah di pesisir melalui berbagai penyesuaian sistem perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir. (Kusumastanto.T, 2003).

Menurut Imran (2003), nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok, yang dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Menurut Kusumostanto (2003), beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam lingkungan masyarakat nelayan tercipta suatu kesenjangan pendapatan yang sangat memprihatinkan antara nelayan pemilik (patron) dan nelayan buruh/pendega(client). Tingkat kesenjangan itu ditunjukkan dengan angka koefisien gini (KG) yang dihitung dengan pendekatan pendapatan yaitu mencapai 0,73. Angka tersebut sudah mendekati titik kritis ($KG \geq 1$, sangat senjang).

Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Mubyanto,1998 dalam Rusman (2005) bahwa masyarakat nelayan ditinjau dari aspek ekonomi memiliki stratifikasi sebagai berikut: (1) nelayan kaya, yang mempunyai kapal yang mempekerjakan nelayan lain sebagai pendega tanpa dia sendiri ikut bekerja; (2) Nelayan kaya, yang mempunyai kapal dan dia sendiri ikut bekerja; (3) nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya sebagai nelayan, dan

mempunyai perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga; (4) nelayan miskin, yang berpendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan bekerja lain untuk kebutuhannya beserta istri dan anaknya; (5) nelayan pendega atau nelayan sawi, yang tidak mempunyai perahu, sehingga kebutuhan hidupnya dipengaruhi oleh bekerja sebagai awak kapal.

E. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembangunan yang terencana dan terstruktur tidak boleh mengabaikan aspek sosial, dan ekologi sumberdaya alam. Pembangunan yang demikian telah dirintis oleh Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang sudah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2000. Namun pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir, terutama nelayan masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal (dipersepsikan miskin) dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. (Anonymous, 2004)

Salah satu penyebab kemiskinan tersebut adalah belum mampunya masyarakat pesisir mengakses permodalan usaha dari lembaga perbankan. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi sumber-sumber pembiayaan yang dapat diakses, prinsipnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan permodalan, kelembagaan dan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan.

Secara umum PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

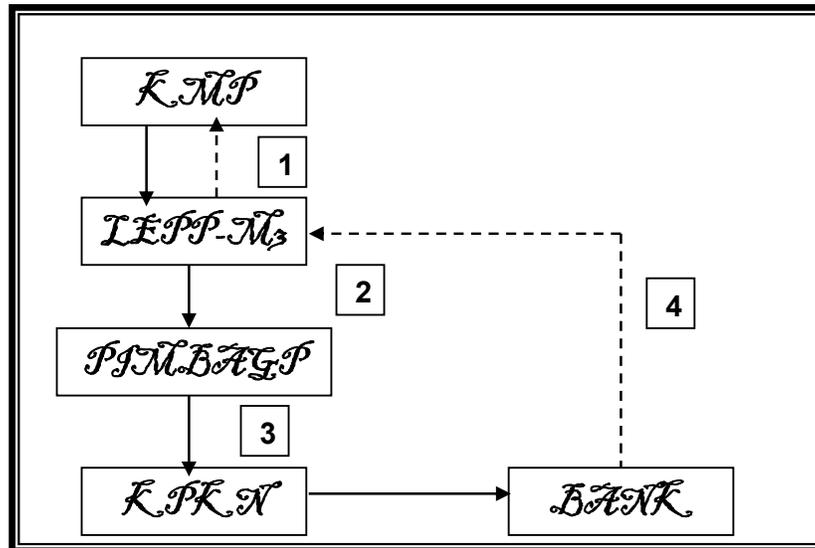
Sasaran Program PEMP adalah masyarakat pesisir dengan skala usaha mikro kecil yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan, *solar packed dealer* untuk nelayan (SPDN) serta pengelolaan wisata bahari, dan berlokasi di daerah sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil.

Program PEMP dirancang untuk tiga periode. Periode pertama, tahun 2001 – 2003, merupakan periode inisiasi dengan focus pada penggalangan partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta perintisan kelembagaan dengan mendirikan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang sejatinya dibentuk sebagai cikal bakal holding company untuk memayungi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Pada periode ini, program PEMP terutama ditujukan untuk mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yang difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran Dana Ekonomi Produktif (DEP).

Penyaluran dan pembayaran dan bantuan kegiatan PEMP Periode 2001 -2003 mengikuti prosedur sebagaimana tercantum dalam Surat

Edaran (SE) Direktorat Jenderal Anggaran. Mekanisme pencairan dana PEMP sebagai berikut :

Gambar II.1. Prosedur Penyaluran, Pembayaran, dan Bantuan Kegiatan PEMP Periode 2001 - 2003



Sumber : PEDUM PEMP 2001

-----> = Pencairan Dana

————> = Pengajuan Dana PEMP

1. KMP dan TPD mengajukan permintaan penyediaan dana kepada LEPP-M3 sesuai dengan prioritas usulan jenis kegiatan dan jumlah dana yang telah disepakati dalam musyawarah Mitra Desa.
2. Usulan yang telah masuk kepada LEPP-M3 dibahas dan diverifikasi dan selanjutnya diserahkan kepada Pimbagpro.
3. Pimbagpro mengajukan permintaan dana kepada KPKN dengan disertai LK (Lembar Kerja), RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) untuk disalurkan ke rekening LEPP-M3. LEPP-M3 diwajibkan membuka rekening di

Bank lokal dengan nama “Rekening PEMP” dan memberitahukan nomor rekeningnya kepada Pimbagpro PEMP Kabupaten/Kota dan KPKN setempat.

4. Ketua atau Pengurus LEPP-M3 yang dikuasakan Ketua mencairkan dana di Bank setempat atas nama “Rekening PEMP” dengan pengawasan dari Pimbagpro. Selanjutnya LEPP-M3 paling lambat dalam waktu 2 minggu menyampaikan dana yang telah dicairkan tersebut kepada KMP sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang disetujui. Masing-masing KMP diharapkan membuat rekening di Bank untuk mencairkan dana dari LEPP-M3.

Periode kedua, tahun 2004 – 2006, merupakan periode intitusional, program difokuskan pada revitalisasi kelembagaan melalui peningkatan status LEPP M3 menjadi berbadan hukum koperasi.

Pengembangan unit usaha pada Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan mengarah pada unit usaha keuangan dan sektor riil. Beberapa unit usaha yang dikembangkan pada Program PEMP adalah Lembaga Keuangan Swamitra Mina, Unit Simpan Pinjam, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir. Unit-unit usaha ini bermitra dengan beberapa lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan milik pemerintah maupun swasta.

1) Swamitra Mina

Swamitra Mina merupakan salah satu unit usaha milik Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan yang bergerak di bidang pelayanan

permodalan bagi masyarakat pesisir, terutama untuk segmen usaha mikro dan kecil. Unit usaha ini bermitra dengan Bank Bukopin dengan orientasi pelayanan permodalan berbasis sistem teknologi perbankan yang *online*. Dengan teknologi ini diharapkan kegiatan usaha keuangan dapat berjalan secara profesional dan dapat dipantau secara terus menerus, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2) Unit Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam (USP) merupakan unit usaha koperasi yang mirip dengan Swamitra Mina, namun unit usaha ini tidak menggunakan sistem perbankan online. Bagi daerah yang karena kondisi geografisnya tidak memungkinkan menggunakan sistem online maka diharapkan menggunakan USP yang dikerjasamakan dengan BPD setempat. Kemitraan ini didasarkan pada kemudahan akses lokasi dan jaminan keberlanjutan pembinaan oleh bank tersebut.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir

Unit usaha koperasi yang lain adalah BPR Pesisir. Unit usaha ini juga menangani kegiatan keuangan pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Unit usaha ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mendekatkan lembaga perbankan kepada masyarakat pesisir yang notabene asing bagi mereka. Unit usaha ini, pendirian dan operasionalisasinya bekerjasama dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN yang bergerak di sektor lembaga pembiayaan. BPR Pesisir nantinya merupakan unit usaha

yang berstatus Perseroan Terbatas (PT). Sebelum BPR resmi berdiri dan sambil menunggu proses perijinan selesai dari BI maka statusnya adalah sebagai Pra BPR yang mempunyai sistem operasional layaknya USP.

Selain beberapa unit usaha yang telah disebutkan di atas, bentuk pula unit usaha kedai pesisir yang menangani sektor riil. Unit usaha ini melayani kebutuhan masyarakat pesisir akan sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam organisasi pengelola Program PEMP 2004 – 2006 yang merupakan periode diversifikasi ada 5 (lima) pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu :

a) Pemerintah

Dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang bertindak sebagai penanggungjawab dan pembina program di tingkat nasional. Penanggungjawab kegiatan ini adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Dirjen KP3K) yang bertugas mengelola program di tingkat nasional, seperti penyusunan pedoman umum, melaksanakan sosialisasi regional, pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan .

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi sebagai representasi DKP di daerah bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan juga mengusulkan Kabupaten /Kota

calon penerima PEMP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi tahun berjalan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota sebagai penanggungjawab operasional program bertugas menetapkan konsultan pelaksana kegiatan , menetapkan koperasi pelaksana, sosialisasi dan publikasi di tingkat kabupaten/ kota, rekrutmen Tenaga Pendamping Desa (TPD), pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

b) Konsultan Manajemen (KM) Kabupaten / Kota

Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, atau perusahaan jasa konsultansi yang ditunjuk langsung oleh Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Tugas KM adalah: (1) membantu Dinas Kabupaten/Kota dalam proses konsolidasi kelembagaan LEPP-M3 hingga menjadi badan hukum koperasi, bagi kabupaten/kota baru; (2) bersama Tenaga Pendamping Desa (TPD) mendampingi dan memfasilitasi masyarakat pesisir untuk mengakses Dana Ekonomi Produktif (DEP); dan (3) bersama TPD melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha.

c) Tenaga Pendamping Desa (TPD)

TPD merupakan tenaga professional di bidangnya yang bersedia tinggal ditengah masyarakat sasaran (minimal berpendidikan

sederajat Diploma III), diutamakan yang telah memiliki pengalaman. Secara rinci tugas TPD adalah: (1) bersama KM mendampingi dan memfasilitasi masyarakat pesisir untuk mengakses DEP; (2) bersama KM melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha; dan (3) membantu masyarakat pesisir untuk mengakses modal usaha yang bersumber dari perbankan.

d) Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP M3) atau Koperasi Perikanan

Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan merupakan ujung tombak pelaksanaan Program PEMP. Koperasi ini merupakan representasi “perusahaan besar” milik masyarakat pesisir yang memiliki beberapa unit usaha sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi ini harus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai pembina program selain juga dengan lembaga perbankan/pembiayaan sebagai mitra usaha mereka.

Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan berperan sebagai penerima DEP yang merupakan modal koperasi dan pengelolaannya diserahkan kepada Swamitra Mina/USP/BPR Pesisir milik koperasi yang bersangkutan. Bagi kabupaten/kota yang baru, Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan yang ditunjuk untuk mengelola DEP harus membentuk Swamitra Mina/USP paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya DEP oleh koperasi tersebut. Sedangkan untuk BPR paling

lambat 6 (enam) bulan setelah diterimanya DEP oleh koperasi tersebut yang sudah harus beroperasi.

Koperasi berfungsi sebagai komponen utama pelaksanaan program PEMP di daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi harus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / kota sebagai penanggungjawab operasional di daerah dan juga dengan lembaga perbankan / pembiayaan sebagai mitra usaha mereka.

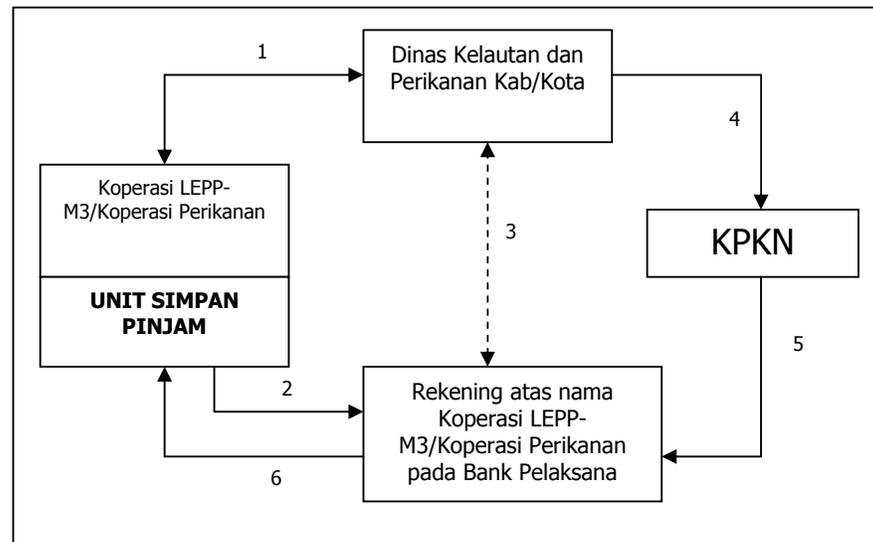
Dalam menjalankan fungsinya, koperasi menerima DEP sebagai hibah yang dijaminan kepada perbankan untuk mendapatkan jaminan. Dana pinjaman tersebut selanjutnya disalurkan untuk diakses masyarakat pesisir melalui LKM milik koperasi yang bersangkutan. Selain itu koperasi ini diharapkan berperan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan unit usaha lain, seperti unit usaha perikanan tangkap/budidaya, kedai pesisir, SPDN, dan wisata bahari.

e) Lembaga Perbankan Pelaksana

Lembaga Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam Bidang Perbankan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DKP dengan tugas dan fungsi : (1) menyediakan kredit bagi koperasi sebagai konsekuensi dari adanya DEP yang dijaminan untuk kegiatan penguatan modal;(2) menyalurkan DEP langsung dengan pola hibah melalui rekening koperasi yang ada di Bank Pelaksana untuk kegiatan

pelaksanaan BPR pesisir, SPDN dan atau Kedai Pesisir ; dan (3) melaksanakan pendampingan teknis dan administrasi kepada koperasi dan atau LKM/USP.

Gambar II.2. Mekanisme penyaluran Dana Ekonomi Produktif (DEP)



Sumber : PEDUM PEMP 2004

Keterangan:

1. Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan mengajukan permohonan normatif kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota, selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota memberikan rekomendasi.
2. Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada Bank Pelaksana serta menyerahkan dan menandatangani seluruh dokumen perjanjian yang diperlukan oleh Bank Pelaksana.

3. Bank Pelaksana (BUKOPIN) bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota mengevaluasi kelengkapan permohonan normatif dari Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan.
4. Proposal disetujui oleh Pimbagpro dan diketahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk kemudian diajukan ke KPKN Daerah dengan dilampiri:
 - a. Surat Perjanjian pemberian DEP antara Penanggung Jawab Kegiatan Tingkat Daerah dengan Ketua Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan yang diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
 - b. Surat Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota tentang penetapan Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan (bagi kab./kota baru).
 - c. Surat Pernyataan Penjaminan Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan.
 - d. Kuitansi Tanda Terima (dari Penanggung Jawab Kegiatan Tingkat Daerah kepada Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan).
5. KPKN Daerah mencairkan DEP dan mentransfer langsung ke rekening masing-masing Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan pada Bank Pelaksana.
6. Setelah Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan melengkapi persyaratan dan telah menandatangani seluruh dokumen yang dipersyaratkan, maka Bank Pelaksana dapat melakukan pengikatan kredit selama jangka waktu 3 tahun untuk program penyaluran DEP

yang dijamin, dan selanjutnya Bank Pelaksana dapat mencairkan pinjaman tersebut kepada masing-masing Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan untuk segera dibukukan sebagai pinjaman di unit usaha keuangan.

7. Mekanisme Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran PEMP

Penetapan Kabupaten/Kota sasaran pelaksanaan program PEMP didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (1) memiliki sumberdaya perikanan dan kelautan relatif besar; (2) memiliki masyarakat pesisir miskin yang relatif banyak; (3) adanya dukungan dan kepedulian dari pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pengembangan kelautan dan perikanan.

Mekanisme penetapan kabupaten/kota sasaran adalah:

- 1) Pemerintah kabupaten/kota mengajukan proposal kepada Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen P3K), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan tembusan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi.
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi memberikan rekomendasi terhadap usulan tersebut dan diteruskan ke Ditjen P3K.
- 3) Ditjen P3K melakukan penilaian dengan melibatkan unsur DKP, Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset. Penilaian didasarkan pada proposal, rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, dan evaluasi pelaksanaan PEMP sebelumnya (bagi daerah yang sudah pernah melaksanakan Program PEMP).

- 4) Tim penilai menghasilkan nominator yang akan ditetapkan sebagai kabupaten/kota definitif setelah dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan mengalokasikan dana pendamping yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota.
 - 5) Kabupaten/Kota terpilih dituangkan dalam SK Dirjen P3K.
8. Penjaminan DEP

Penyaluran DEP kepada masyarakat pesisir melalui koperasi dikerjasamakan dengan lembaga perbankan. DEP terlebih dahulu dibukukan dalam rekening giro atas nama Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan yang bersangkutan untuk kemudian dijadikan jaminan pinjaman atas nama Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan penerima DEP. Khusus untuk Kabupaten/Kota Program BPR Pesisir, DEP dibukukan dalam rekening deposito selama 1 (satu) bulan *automatic roll over (ARO)* atas nama Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan yang bersangkutan dengan bunga sebesar 0%.

Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan harus membukukan pinjaman dari Bank Pelaksana sebagai Modal Tidak Tetap (MTT) pada Swamitra Mina/USP untuk diteruskan sebagai pinjaman kepada anggota atau calon anggota koperasi. Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan harus membayar kewajiban atas pinjaman yang diterima kepada Bank Pelaksana secara tertib setiap bulan dan kelancaran pembayaran kewajiban tersebut akan menjadi pertimbangan untuk

mendapatkan alokasi DEP pada program PEMP tahun berikutnya maupun dana yang bersumber dari Bank Pelaksana atau lainnya.

9. Penyaluran Pinjaman

Penyaluran pinjaman dengan jaminan DEP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan Pinjaman

Pinjaman yang diterima dari Bank Pelaksana dengan jaminan DEP dibukukan sebagai Modal Kerja Tidak Tetap (MTT) di Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan dan dipergunakan untuk disalurkan kepada anggota dan calon anggota sebagai pinjaman sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pemberian pinjaman di Swamitra Mina/USP.

2. Jangka Waktu Pinjaman

- a. Jangka waktu kredit dari Bank Pelaksana kepada Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan maksimal 3 (tiga) tahun.
- b. Jangka waktu pinjaman kepada anggota dan calon anggota koperasi disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha yang dibiayai.

3. Suku Bunga Pinjaman dan Jasa Giro

- a. Tingkat suku bunga pinjaman dari Bank Pelaksana kepada Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan sebesar 6% efektif per tahun dan besarnya jasa giro yang diberikan adalah 2% per tahun.
- b. Suku bunga pinjaman dan jasa giro di-review secara berkala.

- c. Bunga pinjaman dibayar secara rutin setiap bulan, dan kewajiban bunga pinjaman selama 6 (enam) bulan pada tahun pertama dicadangkan.
- d. Bunga pinjaman yang dibebankan kepada anggota dan calon anggota koperasi maksimal sama dengan suku bunga yang berlaku pada BPR atau Koperasi Simpan Pinjam setempat.

4. Biaya-biaya

- a. Provisi kredit tidak dikenakan pungutan biaya.
- b. Administrasi kredit dikenakan pungutan biaya.
- c. Bagi Swamitra Mina, biaya kemitraan sebesar Rp 25 juta dibayar secara proporsional dari setiap pencairan kredit dan penggunaan teknologi sebesar Rp 12 juta per tahun dibayar di muka.

5. Jaminan Kredit/Pinjaman

Agunan terhadap fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan adalah DEP atas nama Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan yang dijaminan.

6. Sanksi

- a. Apabila Kredit Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan menunggak kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Bank Pelaksana berhak mencairkan DEP atas nama Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan yang dijadikan sebagai jaminan untuk digunakan sebagai pelunasan kredit.

- b. Apabila Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan telah menunggak kewajibannya dan Bank Pelaksana telah mencairkan DEP yang dijadikan sebagai jaminan, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan untuk tidak mendapatkan alokasi DEP pada Program PEMP tahun berikutnya maupun dana yang bersumber dari Bank Pelaksana atau lainnya (Anonymous, 2006).

F. Efektivitas

Menurut Burhani dan Lawrens (2000), bahwa efektivitas diterjemahkan ketepatangunaan, hasil guna dan menunjang tujuan. Bila hal itu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah ketepatan untuk menciptakan kondisi dan potensi agar dapat memiliki kembali harkat dan martabat serta kepercayaan diri sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupannya.

Jika efektivitas diartikan sebagai penunjang tujuan sedangkan tujuan diartikan sebagai unsur yang penting bagi terlaksananya suatu kegiatan organisasi, tercapainya tujuan organisasi diperlukan dukungan sumber fasilitas yang cukup yang biasanya berupa:

- a) Sumberdaya manusia
- b) Sumberdaya alam
- c) Sumber sosial

Artinya suatu kegiatan organisasi dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuannya apabila didukung keterkaitan antara sumberdaya manusia yang profesional, fasilitas yang memadai, dan tersedianya sumber-sumber sosial (modal sosial).

Senada dengan Siagian (2001) mengemukakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu upaya organisasi untuk mencapai tujuan yang tepat waktu dan hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sumberdaya, dana, sarana, dan prasarana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Gie (1990), bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya.

Dengan demikian dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu keadaan yang hendak dicapai sesuai waktu yang telah ditetapkan dari suatu kegiatan dengan memanfaatkan sumberdaya, dana dan prasarana.

G. Kerangka Pikir

Bertolak dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab I maka kerangka (alur) pemikiran yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui efektifitas program PEMP dalam upaya peningkatan pendapatan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dalam mengakses modal maka perlu diketahui beberapa persoalan yang ada pada Kelompok Masyarakat Pemanfaat dan Kelembagaan pada Koperasi /LEPP-M3/Swamitra yang menjadi sasaran program PEMP.
- 2) Dengan hasil-hasil yang diperoleh pada butir 1 di atas, dapat dijadikan pembelajaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir melalui upaya pendayagunaan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan. Bagan alur kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar II.3. Kerangka Pikir

